

ABSTRAK

Penelitian “Evaluasi Kebijakan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (LUT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)” bertujuan: (1) untuk mengetahui pencapaian hasil implementasi kebijakan sosial bagi lanjut usia terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) untuk menghasilkan pengembangan model kebijakan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk lanjut usia terlantar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data juga dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jbaran subjek penelitian: (1) BKKBN Provinsi DIY, (2) Dinas Sosial Provinsi DIY, (3) Dinas Kesehatan Provinsi DIY, (4) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, (5) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Abiyoso Yogyakarta dan Budi Luhur Yogyakarta, (6) Lanjut Usia Terlantar (LUT) yang ditangani oleh BPSTW Yogyakarta, (7) Komisi Daerah Lansia DIY, (8) Forum Komunikasi Lansia DIY. Secara keseluruhan, evaluasi hasil implementasi kebijakan sosial bagi LUT menunjukkan belum memiliki capaian yang optimal terkait aspek efisiensi, ketepatan dalam menjawab masalah, dan pemerataan serapan program kepada kelompok sasaran. Sedangkan, hasil yang cenderung optimal dari implementasi kebijakan ini terlihat dari aspek efektivitas, kebermanfaatan, ketepatangunaan dan responsivitas. Penelitian ini telah menghasilkan sebuah model pengembangan kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (LUT) yang representatif untuk diimplementasikan di DIY yang mengadopsi model *participatory policy* yang merupakan elaborasi model *top down policy* dan *bottom up policy* dengan memprioritaskan partisipasi aktif dari masyarakat dan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Meskipun model *participatory policy* ini memberikan ruang partisipasi aktif dari *auxiliaries state bodies*, masyarakat dan kelompok sasaran namun demikian dalam pengimplementasiannya peran negara (pemerintah) dan legislatif masih dibutuhkan untuk melakukan advokasi kebijakan dalam perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial, penyusunan anggaran, *monitoring* dan evaluasi. Adapun luaran yang dari penelitian ini adalah: (1) Manuskrip naskah publikasi ke Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial B2P3KS Yogyakarta; (2) Manuskrip naskah diseminasi hasil penelitian ke seminar nasional Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN) 2016; (3) Panduan pengembangan model kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar yang akan diberikan sebagai rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Kebijakan sosial, kesejahteraan sosial, lanjut usia terlantar.